LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 1 1989 Seri D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR 17 TAHUN 1988

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung merupakan landasan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung baik dalam hubungannya dengan pembangunan jangka panjang maupun dengan pembangunan jangka menengah atau lima tahunan;

b. bahwa berdasarkan hasil-hasil pembangunan selama Pelita IV di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung membawa konsekuensi terjadi perubahan dalam hal potensi dan kondisi serta permasalahannya, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang disusun lima tahun yang lalu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor I Tahun 1984 perlu ditinjau kembali;

c. bahwa penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung berpedoman pada Garis-garis Besar Haluan Negara dan Pola Umum Pembangunan Nasional serta Pedoman Tekhnis Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan telah disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050.1/1153/Bangda tanggal 23 Mei 1988 Jo. No. 050/2104/Bangda tanggal 15 Nopember 1983 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Repelita V Daerah.

Mengingat :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Keputusan Presiden R.I No. 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. XIV Tahun 1981 tentang Pembentukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. XV Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

(1). Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung disusun sebagai Arah dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

(2). Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung adalah sebagai berikut :

BAB. I : PENDAHULUAN.

BAB. II : POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG.

BAB. III : POLA UMUM PELITA V DAERAH.

BAB. IV : PENUTUP.

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung berkewajiban untuk menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung menyusun serta menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. I Tahun 1984 serta ketentuan-ketentuan yang telah diatur terdahulu yang sifat dan isinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, 21 Oktober 1988.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG Ketua,	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G
Cap/tertanda	Cap/Tertanda
H. SUHANDA.	**H. D. C H E R M A N E.**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan tanggal 15 Pebruari 1989
No. 188.342/SK.206-Huk/89.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap/tertanda

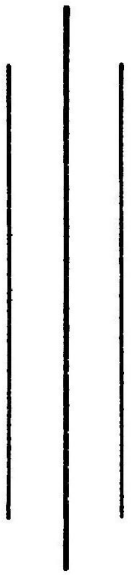
H.R. MOH. YOGIE. S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung,
tanggal 22 Pebruari 1989 Nomor 1, Tahun 1989 Seri D.

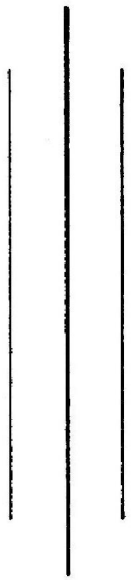
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.
NIP. 480064543.

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
(1989 / 1990 – 1993 / 1994)



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



BAB. I

PENDAHULUAN

1. PENGERTIAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung adalah Garis-garis Besar Kebijaksanaan Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun sebagai arah dan dasar bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, baik untuk jangka panjang, menengah maupun tahunan.

2. KEDUDUKAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung merupakan penjabaran dari GBHN dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat, yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

3. FUNGSI

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung merupakan pedoman bagi seluruh aparatur Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Secara teknis merupakan dasar dan pedoman bagi penyusunan Repelita V Daerah dan Rencana Pengembangan Wilayah, serta penyusunan Rencana Kota secara bertahap dan berkesinambungan.

4. SIFAT/KARAKTERISTIK

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung disusun secara sederhana, mudah dimengerti, konkrit, yang didasarkan pada fakta, kenyataan, dan pertimbangan obyektif rasional, serta memberikan pengaturan tata ruang wilayah/daerah sebagai wadah untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

5. RUANG LINGKUP

Menyangkut seluruh aspek pembangunan yang dilakukan di Daerah. Aspek-aspek tersebut terdiri atas bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

6. SUSUNAN

Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, baik dalam waktu lima tahun mendatang maupun dalam waktu jangka panjang, Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Bandung disusun dan dituangkan dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

II. POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

III. POLA UMUM PELITA V DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

IV. PENUTUP.

BAB. II

POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG JANGKA PANJANG

1. PENDAHULUAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Bandung meliputi Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang dan Pola Umum Pelita V Daerah sebagai arah pembangunan dan pernyataan kehendak serta tekad masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten Dati II Bandung untuk mewujudkan hasrat, cita-cita dan tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai bagian dari perwujudan ketahanan Nasional.

Hasrat, cita-cita dan tujuan masyarakat dimaksud tersebut dalam motto "REPEH RAPIH KERTARAHARDJA" :

REPEH ; dalam arti terciptanya suatu masyarakat yang hidup aman dan tenteram, stabil, penuh dinamika, serta kreativitas dalam mengisi pembangunan daerah serta menunjang pembangunan Nasional dan Regional Jawa Barat.

RAPIH ; dalam arti rukun, damai dan tertib, tidak terdapat pertentangan dalam kelompok masyarakat, baik yang bersifat politis ideologi, religius, maupun kesukuan serta dalam pergaulan hidup berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku dan asas musyawarah untuk mufakat menuju peningkatan serta pemerataan pembangunan di daerah dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

KERTARAHARDJA ; dalam arti suatu tata kehidupan masyarakat di daerah yang bahagia dan sejahtera, baik material maupun spiritual secara seimbang, serasi dan merata menuju masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Motto ini sejalan dengan pembangunan Nasional dan Regional Jawa Barat yang multi dimensi yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang seimbang dan serasi di segala aspek kehidupan masyarakat.

Hal ini berarti bahwa pembangunan daerah tidak hanya mengejar pembangunan lahiriah seperti pangan, sandang, papan, pendidikan kesehatan dan sebagainya, atau kepuasan batiniah seperti rasa aman bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, rasa keadilan dan sebagainya melainkan menyelaraskan, menyerasikan dan me

nyeimbangkan antara keduanya.

Pencapaian tujuan pembangunan yang "REPEH RAPIH KERTA-RAHARDJA" mempunyai dimensi, waktu yang panjang serta dilaksanakan secara simultan, berkesinambungan dan terpadu antara berbagai kebijaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kabupaten Dati II Bandung yang dimulai sejak tahun 1969/1970 melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang berkesinambungan dalam satu kesatuan yang serasi.

Pembangunan, sebagai usaha perubahan ke arah yang lebih baik, secara simultan, terus-menerus dan berkesinambungan mengusahakan :

(1). Ruang juang yang seimbang, serasi dan selaras.

(2). Kondisi juang yang makin maju dan berkembang.

(3). Jiwa juang yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945.

Ruang juang yang semakin seimbang, serasi dan selaras memungkinkan pemanfaatannya yang makin besar, baik untuk kepentingan pembangunan maupun untuk ketahanan Nasional. Kondisi juang yang makin maju dan berkembang memungkinkan pencapaian tahap pembangunan serta ketahanan Nasional yang makin tinggi. Jiwa juang yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945 memungkinkan kesinambungan perjuangan bangsa dan negara.

Dalam kerangka upaya mewujudkan hakekat pembangunan di atas, maka upaya peningkatan kualitas manusia merupakan unsur utama pembangunan, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Peningkatan kualitas manusia sebagai individu tidak hanya di arahkan kepada peningkatan kualitas fisik, namun juga kepada peningkatan kecerdasan dan keahlian, akhlak dan budi luhur serta peningkatan kehidupan beragama. Sebagai makhluk sosial, pembinaan di arahkan kepada pembentukan rasa tanggung jawab yang tinggi pada lingkungan

2. KONDISI DAN POTENSI WILAYAH

Secara geografis, Kabupaten Dati II Bandung mengelilingi Kotamadya Dati II Bandung, sekaligus sebagai wilayah belakang dari Ibukota Propinsi. Kedudukan ini mempunyai arti yang sangat penting dan strategis, baik dipandang dari segi pembangunan eko-

nomi, pembangunan fisik prasarana maupun dari sisi keamanan dan ketertiban.

Stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan (Ipoleksosbud Hankam) dan Agama di Kabupaten Dati II Bandung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keadaan Kotamadya Dati II Bandung, bahkan dapat dijadikan indikator bagi daerah-daerah lain, terutama di Wilayah Pembangunan Bandung Raya.

Sebagai daerah belakang dari Ibukota Propinsi dan Kotamadya Dati II Bandung, Kabupaten Dati II Bandung mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Di samping faktor pertumbuhan alami (kelahiran), faktor migrasi masuk juga memiliki andil yang besar terhadap tingginya laju pertumbuhan penduduk tersebut, terutama di Kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Kotamadya Dati II Bandung.

Keadaan alam yang memungkinkan mengalirnya air dari sungai-sungai seperti Sungai Citarum, Cisangkuy, Ciherang dan sungai lainnya, merupakan potensi pengairan pertanian yang besar dan sumber energi yang tinggi. Akan tetapi di samping merupakan potensi, sekaligus sebagai kendala yang seringkali membawa kerugian.

Kondisi spesifik ini memberikan peran dan fungsi spesifik pula terhadap Kabupaten Dati II Bandung, serta memberikan dorongan dan tuntutan dalam upaya pelaksanaan pembangunan.

a. Fisik/Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

   Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung terletak di dataran tinggi pada garis 107° 22′ BT, 108° 5′ BT, 6° 41′ LS, dan 7° 19′ LS, yang merupakan daerah plateau dengan ketinggian antara 110 meter sampai dengan 2.429 meter di atas permukaan laut. Luas Kabupaten Dati II Bandung sebelum perubahan batas wilayah Kabupaten Dati II Bandung dan Kotamadya Dati II Bandung berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 adalah 317.246 Ha, sedangkan sesudahnya menjadi lebih kurang 308. 366 Ha, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

   Sebelah Utara : Kabupaten Dati II Purwakarta dan Kabupaten Dati II Subang.

   Sebelah Timur : Kabupaten Dati II Sumedang dan Kabupaten Dati II Garut.

Sebelah Selatan : Kabupaten Dati II Garut dan Kabupaten Dati II Cianjur.

Sebelah Barat : Kabupaten Dati II Cianjur.

Penggunaan lahan dari tahun ke tahun selalu berubah dan mengalami pergeseran antara penggunaan satu dengan penggunaan lainnya.

Pergeseran paling besar terjadi pada penggunaan untuk lahan permukiman dan industri.

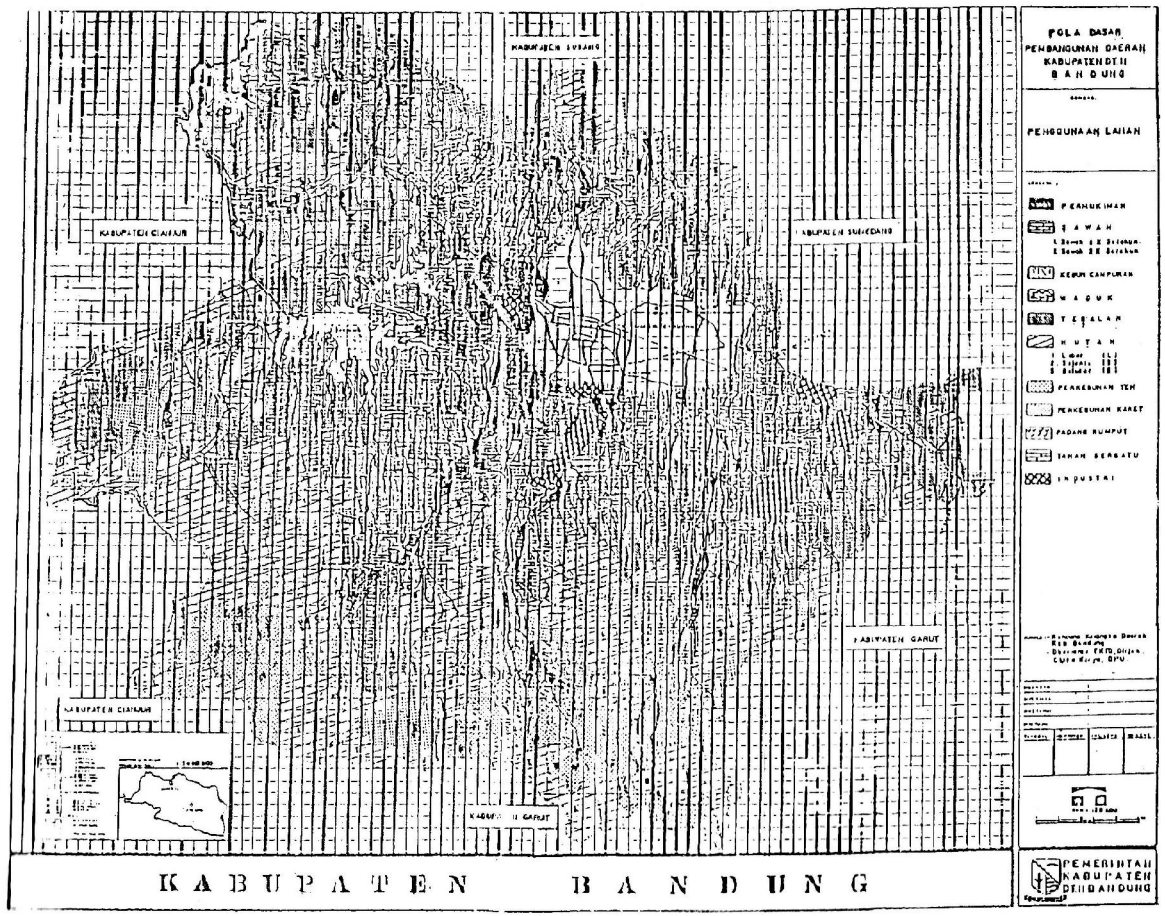
Adapun penggunaan yang banyak tergeser adalah lahan persawahan. Pada tahun 1987 dengan luas wilayah sebelum berlakunya PP. 16 Tahun 1987 penggunaan lahan di Kabupaten Dati II Bandung adalah sebagai berikut: Sawah 54.892 Ha, Tegalan/kebun rakyat 45.940 Ha, Ladang/huma 9.532 Ha, Pekarangan 44.326 Ha, Pengangonan 1.579 Ha, Kolam 1.303 Ha, Hutan Rakyat 9.541 Ha, Hutan Negara 94.439 Ha, Perkebunan besar 44.167 Ha, Tanah bera 447 Ha dan lain-lain 11.180 Ha.

Kabupaten Dati II Bandung berada di dataran tinggi Bandung, terdiri atas daerah landai dan pegunungan terjal. Wilayah ini memiliki lahan yang subur berupa endapan lahar, breksi tufa, serta aliran lava yang terbentuk akibat letusan Gunung Berapi muda yang terjadi dalam beberapa fase.

Di Kabupaten Bandung terdapat sungai-sungai yang berair sepanjang tahun (30 persen) dan yang berair dalam beberapa bulan dalam setahun (70 persen). Sungai Citarum yang bersumber dari Gunung Wayang dan mengalir ke sebelah barat telah dimanfaatkan untuk pembangunan proyek-proyek Nasional, seperti Proyek PLTA Saguling, PLTA Cirata, Bendungan Serbaguna Jatiluhur.

Selain berpotensi sebagai sumber daya alam, juga menimbulkan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh banjir akibat pendangkalan sungai dan lahan kritis di wilayah hulu.

Potensi alam lainnya, berupa energi panas bumi yang terletak di Puncak Gunung Kamojang (bagian selatan Kabupaten Bandung) telah dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik yang dikenal dengan nama PLTP Kamojang. Di samping itu terdapat pula bahan tambang Golongan C, antara lain: batu gamping, batu andesit, teras, marmer, kaolin, batu kuarsa, sirtu (pasir batu) yang tersebar di Kecamatan Padalarang, Ci-


KABUPATEN CIANJUR
KABUPATEN SUKABUMI
KABUPATEN GARUT
KABUPATEN CIANJUR
KABUPATEN GARUT
POLA DASAR
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DT II
B A N D U N G
PENGGUNAAN LAHAN
PERMUKIMAN
S A W A H
KEBUN CAMPURAN
H U T A N
PERKEBUNAN TEH
PERKEBUNAN KARET
PADANG RUMPUT
TANAH BERBATU
K A B U P A T E N B A N D U N G
PEMERINTAH
KABUPATEN
DT II BANDUNG

patat, Margaasih, Batujajar, Soreang, Banjaran, Cicalengka, Lembang dan Kecamatan Majalaya.

Iklim dan panoramanya yang menyenangkan merupakan potensi wisata. Obyek-obyek wisata yang telah dikembangkan antara lain: Pemandian Air Panas Maribaya, Situ Patenggang, Situ Cileunca, Situ Ciburuy dan Gunung Tangkuban Parahu.
Potensi wisata lainnya yang belum dikembangkan di antaranya Bendungan Saguling, Bendungan Cirata, Kawah Kamojang, Curug Sindulang dan air panas Kertamanah.

Di samping potensi alam, yang erat kaitannya dengan kepariwisataan adalah potensi seni budaya seperti Wayang Golek, seni tari dan sebagainya.

Prasarana perhubungan di Kabupaten Dati II Bandung meliputi Jalan Negara 57,935 Km, Jalan Propinsi 173,110 Km, Jalan Kabupaten 339,032 Km, Jalan Desa 714,776 Km. Kondisi jalan-jalan tersebut umumnya baik. Untuk jalan Desa angka di atas merupakan jalan yang sudah dikerjakan dengan dana Inpres, sedangkan untuk jembatan sebanyak 177 buah terdiri atas beton komposit dan gelagar besi.

Sarana pengairan yang ada berupa waduk 2 buah, situ 2 buah, bendungan 436 buah, bangunan pengairan desa/bangunan sadap dan bangunan pelengkap lainnya 1.028 buah serta saluran air (primer dan sekunder) sepanjang 1.816 Km.
Perkembangan kawasan pemukiman cukup pesat dan menyebar terutama di kota-kota yang berorientasi ke kota Bandung. Kota-kota di Kabupaten Dati II Bandung umumnya merupakan kota-kota kecil sebagai Ibukota Kecamatan. Perkembangan dan pertumbuhan kota-kota tersebut, khususnya yang mempunyai tingkat eksesibilitas tinggi seperti Kotip Cimahi dan Dayeuh-kolot, dipengaruhi oleh perkembangan Kodya Bandung.

Di sisi lain, prasarana jalan yang menghubungkan antar kota kecamatan dan antara kota kecamatan dengan desa-desa yang dilayaninya sudah baik dan dapat dilalui baik oleh kendaraan bermotor roda empat dan roda dua.

b. Kependudukan.

Jumlah penduduk Kabupaten Dati II Bandung pada pertengahan tahun 1988 tercatat sebanyak 3.142.863 jiwa dengan

kepadatan rata-rata 990 orang per kilometer persegi. Laju pertumbuhan rata-rata penduduk dalam 4, 5 tahun Pelita IV mencapai 3,12 persen per tahun. Tingginya laju pertumbuhan tersebut di samping karena pertumbuhan alami, juga terutama disebabkan oleh faktor migrasi masuk. Hal ini terjadi karena faktor daya tarik yang dimiliki Kabupaten Dati II Bandung mengingat letaknya yang mengelilingi Kotamadya Bandung sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat serta pengaruh keberhasilan dalam berbagai aspek pembangunan.

Dilihat dari struktur umurnya, penduduk Kabupaten Dati II Bandung termasuk struktur umur muda.
Hal ini terlihat dari proporsi kelompok penduduk berumur 0 – 14 tahun mencapai 42,62 persen.
Penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) diperkirakan berjumlah 2.058.084 orang (65,48 persen dari jumlah penduduk).
Dari jumlah tersebut yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak lebih kurang 984.231 orang.
Dengan demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 1987 sebesar 47,82 persen.

Salah satu upaya pemecahan masalah kependudukan dan lapangan kerja adalah melalui program transmigrasi. Adapun pelaksanaan program transmigrasi sampai bulan Desember 1988 tercatat 21.668 orang atau 5.796 KK berhasil diberangkatkan. Jumlah tersebut baru mencapai 80,31 persen dari yang ditargetkan sebanyak 7.217 KK pada Pelita IV.

c. Sosial.

Masyarakat Kabupaten Dati II Bandung berperikehidupan agamis, senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral luhur dan ketahanan diri yang tangguh untuk menghadapi berbagai perubahan, baik fisik maupun sosial, termasuk perubahan tata nilai yang terjadi akibat pembangunan yang pesat. Kehidupan beragama berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari kegiatan-kegiatan Da'wah, pendidikan pesantren dan jumlah sarana keagamaan yang semakin meningkat. Hingga tahun 1987 prasarana peribadatan di Kabupaten Dati II Bandung meliputi: Mesjid 4.791 buah, Langgar/Surau 10.245 buah, Musholla 1.031 buah, Gereja 29 buah, Pura 1 buah.
Adapun prasarana pendidikan keagamaan meliputi: Pondok

Pesantren 139 buah dan Madrasah 601 buah (terdiri atas Madrasah Diniyah 246 buah, Ibtidaiyah 276 buah, Tsanawiyah 59 buah dan Madrasah Aliyah 20 buah), dengan Guru Agama sebanyak 5.344 orang. Dalam hal kerukunan hidup beragama, telah tercipta suasana kerukunan, baik antar pemeluk agama maupun sesama pemeluk agama.

Pada umumnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin meningkat. Hal ini terlihat dari makin besarnya jumlah murid yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Namun demikian, tingkat pendidikan penduduk di sebagian wilayah pedesaan relatif masih rendah, dengan rata-rata pendidikan yang diselesaikan hanya sampai tingkat Sekolah Dasar.

Daya tampung sarana pendidikan terhadap penduduk usia sekolah sampai tahun keempat Pelita IV adalah: SD 92 persen, SMTP 38,2 persen dan SMTA 50 persen. Adapun jumlah Perguruan Tinggi berkembang menjadi 15 buah yang tersebar di wilayah Kabupaten Dati II Bandung.

Kondisi kesehatan masyarakat di daerah pedesaan pada umumnya relatif makin baik meskipun di sebagian wilayah pedesaan masih sensitif terhadap wabah penyakit. Hal ini disebabkan antara lain oleh tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan yang masih rendah serta keadaan alam dan lingkungan yang kurang menguntungkan.

Prasarana dan sarana kesehatan yang ada sampai tahun 1988 meliputi 2 buah Rumah Sakit Tipe C, 8 buah Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) dan 62 buah Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan (TTP).

Tenaga medis dan paramedis terdiri atas: Dokter 156 orang, Perawat 110 orang, Bidan 80 orang dan rumah obat/apotik 46 buah. Dalam usaha menanggulangi keadaan kesehatan masyarakat telah terlihat peranserta masyarakat melalui LKMD, UPGK dan Posyandu.

d. Ekonomi.

Laju pertumbuhan rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dati II Bandung selama Pelita IV berdasarkan harga konstan tahun 1975 mencapai 8,45 persen

per tahun atau 15 persen per tahun menurut harga berlaku dengan pendapatan per capita rata-rata per tahun sebesar Rp 337.859,18.
Kontribusi rata-rata per tahun setiap sektor terhadap PDRB selama Pelita IV adalah sebagai berikut:
Pertanian 26,78 persen, Perdagangan, Hotel dan Restauran 23,73 persen, Industri 16,57 persen, Pertambangan dan Penggalian 0,55 persen, Listrik, Gas dan Air Minum 0,73 persen, Bangunan dan Konstruksi 10,86 persen, Pengangkutan dan Komunikasi 8,20 persen, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya 0,90 persen, Sewa Rumah 1,89 persen, Pemerintahan dan Hankam 3,88 persen serta Jasa-jasa 5,91 persen.

Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung berpotensi sebagai sentra produksi tanaman pangan (padi) dengan luas areal mencapai 19,85 persen dari luas Kabupaten Bandung. Sentra tersebut meliputi: Kecamatan Soreang, Banjaran, Cicalengka, Ciparay, Majalaya dan Rancaekek.
Sentra palawija di antaranya terdapat di wilayah Kecamatan: Cipatat, Cipeundeuy, Cikalongwetan dan Cililin.
Sentra holtikultura di antaranya meliputi wilayah Kecamatan: Pangalengan, Lembang, Pacet, Kertasari dan Cisarua.

Luas perkebunan di Kabupaten Dati II Bandung lebih kurang 44.167 Ha atau 13,92 persen dari luas wilayah Kabupaten Bandung. Perkebunan tersebut terdiri atas perkebunan besar milik negara, swasta dan perkebunan rakyat, yang terdapat di wilayah Kecamatan Pangalengan, Ciwidey, Cipeundeuy dan Cikalongwetan dengan arah perkembangan ke wilayah Kecamatan Lembang, Cicalengka dan Pacet.

Kawasan hutan yang ada di Kabupaten Dati II Bandung dibagi dalam dua kawasan pengelolaan, yaitu KPH Bandung Utara dan KPH Bandung Selatan dengan luas keseluruhan 94.438,87 Ha atau 29,76 persen dari luas wilayah.

Luas KPH Bandung Utara meliputi:

- Hutan Lindung : 9.047,44 Ha
- Hutan Produksi : 5.513,23 Ha
- Hutan Wisata : 1.002,50 Ha
- LDTI : 0,75 Ha.

Luas KPH Bandung Selatan meliputi:

- Hutan Lindung : 24.463,32 Ha
- Hutan Produksi : 36.147,08 Ha
- Hutan PPA : 9.387,30 Ha
- Hutan lainnya : 8.877,25 Ha

Potensi peternakan yang menonjol antara lain: Sapi perah, ternak potong, unggas dan ternak lainnya terdapat di wilayah Kecamatan Pangalengan, Ciwidey, Pasirjambu, Pacet; Kertasari, Lembang, Cikalongwetan, Ujungberung dan Banjaran.

Fauna yang masih terdapat di wilayah Kabupaten Dati II Bandung adalah jenis-jenis hewan dan burung yang dilindungi oleh Undang-undang, antara lain masih terdapat burung Belibis di Danau Ciharus, komplek Kamojang serta terdapat pula pembibitan hewan rusa di hutan Leuwiliang di Desa Dampit Kecamatan Cicalengka.

Potensi perikanan sebagai sumber kehidupan masyarakat yang pemeliharaannya melalui sistem kolam air deras (RWS), kolam air tenang, jaring terapung dan pemeliharaan di sawah sebagai penyelang pertanian tanaman yang terdapat di Kecamatan Pasirjambu, Soreang, Banjaran, Pacet, Paseh, Majalaya, Ciparay, Rancaekek dan Buahbatu.

Perkembangan industri di Kabupaten Dati II Bandung masih cukup pesat. Industri yang menonjol khususnya yang berorientasi ekspor antara lain: Industri tekstil dan garmen dengan produksi lebih kurang 60 persen dari produksi Nasional. Adapun nilai ekspor yang tercatat tahun 1985 sebesar:
US $ 51.141.715,30, tahun 1986 sebesar
US $ 5.499.698,63, tahun 1987 sebesar
US $ 142.114.809,62.
Jumlah perusahaan pada tahun 1988 tercatat 199 buah, terdiri atas PMA 10 buah, PMDN 109 buah, Perusahaan ekspor produsen 53 buah dan perusahaan ekspor umum 4 buah.
Industri lainnya yang cukup berkembang adalah industri logam, Farmasi, bahan bangunan, makanan/minuman serta industri yang mengolah hasil pertanian dan perkebunan. Demikian pula terdapat sentra-sentra industri kecil/industri rumahan seperti konveksi di Soreang, pandai besi di Pasirjambu dan Ciwidey, kapas kecantikan di Paseh, kain pembalut di Cikancung serta

lingkungan industri kecil perkulitan di Ujungberung. Lembaga-lembaga ekonomi cukup berkembang, baik Badan Usaha Milik Negara/Daerah seperti: PN, PD (BKPD/LPK) maupun swasta dalam bentuk PT, CV, Firma dan terutama sekali usaha perorangan yang tumbuh dan berkembang di Pedesaan. Adapun lembaga ekonomi khususnya Koperasi secara kuantitatif cukup berkembang, tetapi secara kualitatif masih perlu pembinaan terutama dalam hal permodalan dan managemen. Koperasi yang perkembangannya cukup pesat adalah Koperasi Susu (KPBS) di Pangalengan, Koperasi Angkutan (KOBUTRI), KUD Soreang, Koperasi Tahu/Tempe (KOPTI) di Cimahi, (KUD Sarwa Mukti di Cisarua), KUD Sinar Jaya di Ujung Berung, Koperasi Pandai Besi di Pasirjambu dan KPBSU di Lembang.

e. Pemerintahan.

Kabupaten Dati II Bandung yang setelah PP No. 16 Tahun 1987 luasnya menjadi 308.366 Ha, mencakup 1 Kota Administratif, 11 Wilayah Kerja/Pembantu Bupati, 38 Kecamatan, 8 Perwakilan Kecamatan, 416 Desa dan 22 Kelurahan.

Penyelenggaraan sistem Pemerintahan Di Daerah belum berjalan secara optimal dalam mewujudkan sasaran pembaruan dan pembangunan. Hal yang paling menonjol adalah masih terdapatnya kelemahan dalam koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian pembangunan.

Pembinaan dan peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian masih perlu ditingkatkan terutama yang berhubungan dengan ketertiban hukum, keagrariaan, kamtibmas, penerangan dan komunikasi.

3. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Bandung adalah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur dalam keseimbangan material dan spiritual yang tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang "Repeh Rapih Kertarahardja" berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG.

Selaras dengan tujuan pembangunan di atas, maka ditempuh

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan masyarakat, peningkatan pembangunan daerah di segala bidang secara rasional, obyektif, terarah dan terpadu. Dengan demikian pendayagunaan segala sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, ditujukan untuk mencapai sasaran bagi kepentingan daerah sendiri serta mengisi pembangunan Nasional dan Regional dalam rangka meletakkan landasan yang kuat untuk tahapan pembangunan berikutnya.

Prioritas pembangunan Kabupaten Dati II Bandung dititikberatkan pada pembangunan bidang ekonomi.
Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan Jawa Barat dan Nasional. Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Dati II Bandung dalam menunjang pembangunan Regional Jawa Barat dan Nasional tersebut, dikembangkan melalui intensifikasi dan diversifikasi produksi untuk mewujudkan struktur ekonomi pertanian dan industri yang seimbang. Hal ini akan menimbulkan kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri pengolahan, tataniaga dan sektor pedesaan. Dalam hubungan ini, pengembangan Koperasi sebagai wahana modernisasi dan dinamisasi ekonomi rakyat pedesaan/ekonomi lemah sangatlah penting.
Peningkatan orientasi ekonomi koperasi perlu disertai dengan pengembangan keahlian/profesionalisme.
Arah pembangunan industri yang ditujukan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih seimbang tersebut tetap mempertimbangkan kelestarian dan keseimbangan sumber alam dan lingkungan. Selain itu pembangunan industri sendiri harus mempunyai proporsi yang seimbang antara industri besar, menengah dan kecil. Industri besar yang padat modal di wilayah perkotaan diimbangi dengan industri pedesaan yang menggunakan teknologi tepat guna dan bersifat padat karya, sehingga keseimbangan pembangunan kota/desa dalam kerangka pengembangan wilayah yang serasi dan seimbang bisa terlaksana.

Pembangunan Kabupaten Dati II Bandung akan dilaksanakan melalui pendekatan tata ruang serta pengembangan bidang/sektor. Kebijaksanaan tata ruang pada prinsipnya berupaya memadukan dan menyelaraskan berbagai kebijaksanaan bidang dan sektor yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing.

a. Kebijaksanaan Tata Ruang.

Dalam kebijaksaaan Pengembangan Wilayah Bandung Raya dan Pola Dasar Pembangunan. Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat, Kabupaten Dati II Bandung termasuk pada Wilayah Inti Bandung Raya, di mana empat dari enam fungsi utama Bandung Raya dapat ditunjang oleh Kabupaten Bandung, yaitu pusat pengembangan industri, pengembangan sumber energi, pertanian, konservasi dan lingkungan hidup.

Kota-kota kecil yang berada di sekitar Kota Bandung seperti Cicalengka, Majalaya, Banjaran, Soreang, Cimahi, Padalarang dan Lembang menurut kedua kebijaksanaan tersebut di arahkan untuk berfungsi sebagai sembrani tandingan (counter magnet). Dalam kegiatan dasarnya Kabupaten Dati II Bandung salah satunya di arahkan sebagai pusat pengembangan industri di wilayah Pembangunan Bandung Raya. Di mana alokasi kegiatan industri tersebut adalah di kota-kota kecil/kecamatan tersebut di atas yaitu Rancaekek, Cicalengka, Majalaya, Padalarang, Cimahi Selatan dan Banjaran. Untuk menunjang berfungsinya kota-kota tersebut maka Pemerintah Kabupaten Dati II Bandung akan meningkatkan pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota:

1. Cicalengka – Majalaya – Ciparay – Banjaran – Soreang.
2. Soreang – Batujajar – Padalarang.
3. Soreang – Sindangkerta – Cipongkor – Cipatat.
4. Soreang – Ciwidey – Cipelah (terus ke Kabupaten Cianjur).
5. Gununghalu – Sindangkerta.
6. Ciparay – Pacet – Kertasari.
7. Majalaya – Ibun – Kamojang.
8. Majalaya – Gedebage.
9. Majalaya – Rancaekek.
10. Cimahi – Cisarua – Lembang.

Untuk lebih memanfaatkan Terminal Peti Kemas Bandung (TPKB) maka dari sentra-sentra industri tersebut jaringan jalannya akan ditingkatkan.

Waduk Saguling dan Cirata, di samping berfungsi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), juga akan dikembangkan sebagai obyek wisata serta pengembangan kegiatan akuakultur.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 181.1/SK.1624-Bapp/1982 tentang Peruntukan Lahan di Wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara, maka fungsi utama sebagian dari wilayah kecamatan-kecamatan Cikalongwetan, Padalarang, Cisarua, Ngamprah, Cimahi Utara, Cimahi Tengah, Lembang, Cicadas dan Ujungberung adalah sebagai wilayah konservasi yang pengembangannya dibatasi.

Agar kegiatan pembangunan berjalan secara berdayaguna, berhasilguna dan berkelanjutan sesuai dengan tipologi, potensi dan kendala setiap satuan wilayah di Kabupaten Dati II Bandung, maka perlu dilakukan regionalisasi/perwilayahan pembangunan guna mengarahkan dan mengintegrasikan setiap kegiatan/program pembangunan di Kabupaten Dati II Bandung. Perwilayahan Pembangunan ini didasarkan pada pola aliran barang dan orang, homogenitas wilayah, sistem pusat-pusat serta sedapat mungkin disesuaikan dengan batas wilayah administrasi.

Dengan adanya kebijaksanaan dan proyek-proyek Nasional di Kabupaten Bandung seperti PLTA Saguling, PLTA Cirata, Jalan Toll Padalarang – Cileunyi, PP. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Administrasi Kotamadya dan Kabupaten Bandung, serta PP. No. 2 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Bandung ke Soreang, maka perwilayahan Pembangunan (pembagian WP) dalam Pelita IV dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan yang diperkirakan.

Karena itu jumlah maupun batas wilayah Pembangunan dalam Repelita V yang akan datang berbeda dengan jumlah dan batas wilayah Pembangunan dalam Pelita IV yang lalu. Dalam Repelita V yang akan datang, Kabupaten Dati II Bandung dibagi menjadi 10 Wilayah Pembangunan (WP) yaitu:

1. Wilayah Pembangunan Cikalongwetan.

   Meliputi Kecamatan Cikalongwetan dan Kecamatan Cipeundeuy, dengan Pusat Pengembangan di Kota Kecamatan Cikalongwetan. Kegiatan dasarnya adalah perkebunan (teh).

   a. Kecamatan Cikalongwetan, selain sebagai kawasan perkebunan, di bagian timurnya diperuntukkan sebagai kawasan konservasi.

b. Kecamatan Cipeundeuy, selain sebagai kawasan perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan juga di arahkan untuk pengembangan wisata PLTA Cirata.

2. Wilayah Pembangunan Padalarang.

Meliputi Kecamatan Padalarang, Cipatat, Batujajar dan Kecamatan Ngamprah dengan pusat pengembangan di Kota Padalarang. Kegiatan dasarnya adalah pertanian, industri dan perdagangan.
Daerah perkotaannya di arahkan sebagai daerah transit perdagangan, pariwisata dan daerah industri/pergudangan.

a. Kecamatan Padalarang di arahkan untuk kawasan pertanian dan konservasi.

b. Kecamatan Batujajar di arahkan untuk pertanian lahan kering, penambangan galian C dan bagian timur wilayah ini (dekat jalan Toll "Panci") di arahkan untuk pengembangai industri (terbatas).

c. Kecamatan Ngamprah di arahkan untuk pengembangan pertanian dan perumahan.

d. Kecamatan Cipatat di arahkan untuk pengembangan pertanian dan industri dasar.

e. Kawasan Ciburuy dan sekitar Bendungan Saguling di arahkan untuk pengembangan parisiwata.

3. Wilayah Pembangunan Sindangkerta.

Terdiri atas Kecamatan Sindangkerta, Cipongkor dan Gununghalu dengan pusat pengembangan di Kota Kecamatan Sindangkerta. Kegiatan dasarnya adalah pertanian dan perkebunan.

a. Wilayah belakangnya di arahkan untuk pengembangan pertanian, perikanan dan perkebunan.

b. Kawasan sekitar Waduk Saguling di arahkan untuk pengembangan pariwisata.

c. Di sekitar Waduk Saguling dikembangkan untuk pertanian lahan basah/kering dan pertanian akuakultur.

4. Wilayah Pembangunan Soreang.

Meliputi Kecamatan Soreang, Cililin, Katapang, Pasirjambu dan Ciwidey dengan pusat di Kota Soreang. Kegiatan dasarnya adalah pusat pemerintahan, jasa perdagangan, permukiman dan pertanian.

a. Kota Soreang di arahkan sebagai pusat pemerintahan Tingkat Kabupaten, permukiman, perdagangan dan industri rumahan.

b. Wilayah belakangnya di arahkan untuk pengembangan perkebunan, pertanian, perikanan, pariwisata dan industri rumahan.

c. Kecamatan Ciwidey dan Pasirjambu di arahkan untuk pengembangan perkebunan, peternakan, pertanian, industri kecil dan pariwisata.

d. Kecamatan Katapang di arahkan untuk pengembangan kegiatan pertanian dan industri rumahan/kecil.

e. Kecamatan Cililin di arahkan untuk pengembangan pertanian, perikanan, pariwisata dan industri rumahan.

5. Wilayah Pembangunan Banjaran.

Meliputi Kecamatan Banjaran, Pameungpeuk dan Pangalengan yang berpusat di Kota Kecamatan Banjaran. Kegiatan dasarnya adalah industri perkebunan, pertanian dan konservasi. Kawasan perkotaannya di arahkan sebagai pusat perdagangan dan industri.

a. Kecamatan Pangalengan di arahkan untuk pengembangan perkebunan, peternakan, pertanian dan hutan lindung.

b. Kecamatan Pameungpeuk di arahkan untuk kegiatan pertanian, industri terbatas dan penambangan galian C.

c. Bagian selatan diarahkan untuk wilayah konservasi.

6. Wilayah Pembangunan Majalaya.

Meliputi Kecamatan Majalaya, Ciparay, Kertasari, Pacet, Paseh dan Ibun. Kegiatan dasarnya adalah industri, pertanian, perdagangan, perikanan dan konservasi.

a. Pusat pengembangannya di Majalaya yang di arahkan

untuk kegiatan industri dan perdagangan.

b. Daerah belakangnya yang meliputi Kecamatan Kertasari, Pacet, Paseh, Ibun dan Ciparay di arahkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan dan konservasi.

c. Kecamatan Ciparay di arahkan untuk kegiatan pemukiman, pertanian, perikanan dan perdagangan.

d. Baleendah di arahkan sebagai pusat kegiatan pendidikan, pengembangan fasilitas sosial dan perumahan.

e. Daerah Jelegong untuk pengembangan industri dasar/ galian C.

7. Wilayah Pembangunan Cicalengka.

Meliputi Kecamatan Cicalengka, Rancaekek dan Cikancung. Kegiatan dasarnya adalah pertanian, industri, perdagangan, pergudangan dan konservasi.

a. Pusat pengembangannya di Cicalengka yang di arahkan untuk kegiatan perdagangan, industri dan pergudangan.

b. Lokasi industri lainnya dikembangkan di Kecamatan Rancaekek dan Cikancung.

c. Kecamatan Rancaekek bagian Selatan di arahkan untuk kawasan pemukiman dengan memperhatikan pengembangan (rencana) Lapangan Udara Rancaekek.

d. Daerah belakangnya di arahkan untuk kegiatan pertanian dan perikanan.

8. Wilayah Pembangunan Lembang.

Mencakup Kecamatan Lembang dan Kecamatan Cisarua. Kegiatan dasarnya adalah pertanian, perkebunan dan pariwisata.

a. Pusat pengembangannya di Lembang, yang juga di arahkan untuk pengembangan kegiatan pendidikan/penelitian pariwisata, pertanian, perkebunan, konservasi air, peternakan dan perdagangan.

b. Daerah pinggiran Kecamatan Cisarua di arahkan untuk kegiatan perkebunan, pertanian, peternakan, pariwisata dan konservasi.

9. Wilayah Pembangunan Cimahi.

Meliputi Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Tengah, Cimahi Selatan dan Margaasih. Kegiatan dasarnya adalah industri, perdagangan dan pendidikan dengan pusat pengembangan di Kota Administratif Cimahi.

a. Cimahi Tengah dikembangkan untuk kegiatan perdagangan, pendidikan, sarana sosial dan perumahan.

b. Kegiatan industri dan pergudangan dikembangkan secara terbatas di Kecamatan Cimahi Selatan.

c. Kecamatan Margaasih di arahkan untuk pengembangan perumahan, industri rumahan dan pertanian.

d. Cimahi Utara di arahkan untuk kegiatan pertanian dan kawasan konservasi.

e. Daerah Leuwigajah sebagai pengembangan Galian C.

10. Wilayah Pembangunan "Penyangga"

Meliputi Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, Cileunyi, Bojongsoang, Dayeuhkolot dan Kecamatan Margahayu berfungsi sebagai kawasan penyangga Kota Bandung yang merupakan Ibukota Propinsi. Kegiatan dasarnya adalah industri, perdagangan, permukiman dan konservasi.

a. Kecamatan Cilengkrang dan Kecamatan Cimenyan di arahkan untuk kegiatan pertanian, peternakan dan sebagai kawasan konservasi.

b. Kecamatan Cileunyi di arahkan untuk kawasan permukiman dan fasilitas sosial.

c. Kecamatan Bojongsoang di arahkan untuk kawasan pertanian.

d. Kecamatan Dayeuhkolot di arahkan untuk kegiatan perdagangan, industri (secara terbatas), pertanian dan perumahan.

e. Kecamatan Margahayu di arahkan untuk pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa.

b. Kebijaksanaan Bidang/Sektor Pembangunan.

1. Bidang Ekonomi.

a. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.

b. Peningkatan produksi serta penyediaan sandang, pangan dan papan.

c. Peningkatan arus pemasaran barang dan jasa produksi masyarakat.

d. Penggeseran struktur ekonomi secara bertahap dari agraris ke industri melalui percepatan pertumbuhan industri terutama yang berorientasi ekspor.

e. Peningkatan fungsi lembaga ekonomi masyarakat terutama Koperasi.

f. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan melalui optimasi tata guna lahan bagi pengembangan kegiatan sosial ekonomi.

g. Peningkatan prasarana perekonomian yang dapat menunjang pengembangan kegiatan ekonomi.

h. Perluasan kesempatan kerja di pedesaan untuk mengurangi tekanan angkatan kerja di sektor pertanian.

2. Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya.

a. Peningkatan mentalitas, kreativitas, dinamika dan tanggung jawab masyarakat melalui peningkatan ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Peningkatan pendidikan dan keterampilan, serta keahlian penduduk dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui Gerakan Hidup Sehat (GHS) serta peningkatan pelayanan, prasarana dan sarana kesehatan masyarakat.

d. Pengendalian laju pertambahan penduduk dan penyebarannya.

e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemasyarakatan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).

f. Peningkatan produktivitas kerja dan perlindungan tenaga kerja terutama tenaga kerja wanita.

g. Perluasan peranserta masyarakat dalam setiap usaha pem-

bangunan.

h. Penggalakan dan pengembangan program transmigrasi khususnya transmigrasi swakarsa, untuk meningkatkan taraf hidup penduduk, mengurangi kepadatan penduduk serta memperluas kesempatan bekerja dan berusaha.

3. Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Media Massa.

a. Peningkatan kesadaran bernegara dan berpolitik yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Pembinaan Aparatur Pemerintah yang bersih, berwibawa, abdi Negara dan abdi masyarakat, serta sebagai pelopor pembangunan melalui upaya peningkatan kualitas pengawasan, baik fungsional maupun melekat serta peningkatan disiplin.

c. Peningkatan usaha-usaha untuk penataan kembali wilayah administrasi pemerintah khususnya desa, kecamatan dan perwakilan kecamatan yang dipadukan dengan kepentingan pembangunan wilayah.

d. Peningkatan kesadaran, pelayanan, penegakan dan kepastian hukum.

e. Peningkatan peranan penerangan dan Media Massa dalam usaha mensukseskan pembangunan.

4. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

a. Pembinaan suasana kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan stabil.

b. Peningkatan peranserta masyarakat dalam sistem bela Negara.

c. Pemantapan Ketahanan Nasional di daerah dengan melalui penciptaan kondisi dinamis daerah yang merupakan integrasi dari setiap aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan dan stabilitas daerah yang meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan agama.

d. Pemeliharaan kemantapan kewaspadaan nasional terhadap bahaya latent komunis dan kejahatan lainnya yang

membahayakan kehidupan bangsa dan negara.

5. Catatan Dasar.

Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang ini merupakan landasan pokok bagi penyusunan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Menengah yaitu Pola Umum Pembangunan Lima Tahun sebagai dasar penyusunan Repelita V Daerah Kabupaten Dati II Bandung, Rencana Tata Ruang Daerah dan Rencana Kota.

BAB. III

POLA UMUM PELITA V DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

1. PENDAHULUAN.

Pola Umum Pelita V Daerah Kabupaten Dati II Bandung merupakan penjabaran dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan merupakan dasar bagi penyusunan Repelita V Daerah yang memberikan arah kebijaksanaan sektor/sub sektor dan program pembangunan untuk kurun waktu 1989/1990 sampai 1993/1994.
Pelita V merupakan perluasan, peningkatan, pengembangan, penyempurnaan dan kelanjutan dari Pelita-pelita sebelumnya baik dari segi konsepsi, pendekatan, proses maupun materinya.
Hasil positif yang telah dicapai selama Pelita I s/d IV merupakan landasan kuat untuk pelaksanaan pembangunan tahap ke V. Adapun masalah-masalah yang belum terpecahkan selama pelaksanaan pembangunan sebelumnya akan diusahakan untuk diselesaikan dalam Repelita V. Karena itu masalah pokok Repelita V bukan saja masalah yang akan dihadapi lima tahun mendatang, namun juga masalah yang belum diselesaikan pada Pelita sebelumnya.

Secara umum, pelaksanaan Pelita IV di Kabupaten Dati II Bandung telah mencapai hasil yang menggembirakan. Sasaran-sasaran pembangunan sebagian besar tercapai bahkan terlampaui, meskipun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan.

Dalam bidang ekonomi, keberhasilan tersebut tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan keberhasilan dalam bidang/sektor lain ditunjukkan dengan keberhasilan program KB dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk meskipun besarnya tingkat migrasi masuk menyebabkan laju pertumbuhan penduduk rata-rata masih relatif tinggi.

Selama Pelita IV laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung mencapai rata-rata 9,95 persen per tahun. Produksi kegiatan ekonomi utama yaitu pertanian dan industri bertumbuh pesat. Swasembada pangan dapat dipertahankan, bahkan Kabupaten Bandung memberi andil pada pengadaan pangan nasional. Surplus beras di Kabupaten Dati II Bandung selama Pelita IV sebesar 163.292 ton beras. Demikian pula dalam sektor industri, volume dan nilai ekspor komoditas non migas meningkat pesat. Langkah-langkah yang diambil dalam

rangka penggalakan ekspor non migas telah membuahkan hasil. Nilai ekspor dari Kabupaten Dati II Bandung pada tahun 1987 mencapai US $ 142.114.809,62 jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor pada tahun 1985 yang US $ 51.141.715,30.

Berkembangnya perekonomian di atas telah memberi andil pada penciptaan lapangan kerja. Namun karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, 3,15 persen per tahun, maka masalah ketenagakerjaan pun masih menghadapi tantangan yang berat.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, terdapat beberapa masalah pokok yang belum terselesaikan, antara lain:

1. Masalah mutu sumber daya manusia, antara lain: berupa nilai budaya yang belum mendukung pembangunan, tingkat pendidikan penduduk masih rendah, serta kesehatan masyarakat dan lingkungan masih rendah dan masih sensitif endemik.
2. Masalah perluasan kesempatan kerja antara lain: perluasan kesempatan kerja tidak seimbang dengan pertambahan angkatan kerja, keterampilan angkatan kerja terutama di pedesaan masih rendah, efisiensi kerja terutama di desa relatif kurang, mekanisme pasar kerja masih belum berjalan lancar, koordinasi perencanaan tenaga kerja di daerah dan koordinasi latihan tenaga kerja masih kurang.
3. Masalah pengembangan dan perluasan aktivitas ekonomi yang belum menunjang pengembangan lembaga ekonomi dan ekspor non migas antara lain: belum berfungsinya Koperasi secara optimal terhadap kesejahteraan anggotanya, belum terciptanya secara maksimal iklim usaha yang menunjang peranserta usaha swasta.
4. Masalah pendayagunaan aparatur pemerintah antara lain: kemampuan dan jumlah aparatur pemerintah yang masih terbatas, luas wilayah pelayanan administrasi tidak seimbang dengan banyaknya penduduk.
5. Masalah ketimpangan antara pemanfaatan dengan pelestarian keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan antara lain terdiri atas: daya dukung sumber daya alam dan lingkungan cenderung semakin menurun, penggunaan lahan kurang terkendali, ketidakseimbangan perkembangan kota dan desa, pengamatan pencemaran lingkungan dan usaha pencegahannya

masih belum efektif.

Di samping masalah-masalah di atas, masalah khusus di Kabupaten Dati II Bandung adalah:

1. Masalah pembangunan Ibukota Kabupaten Dati II Bandung di Soreang, terutama pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten dan pembangunan sarana prasarana perkotaan yang mendukungnya.
2. Masalah berkurangnya lahan pertanian produktif oleh kegiatan lain yang dapat mengancam kelanjutan swasembada pangan.
3. Masalah laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi di atas rata-rata nasional.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka akan ditempuh strategi kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu sumber daya manusia.
2. Perluasan dan pengembangan aktivitas ekonomi yang menunjang pengembangan lembaga ekonomi terutama Koperasi.
3. Perluasan kesempatan kerja yang wajar terutama di pedesaan.
4. Pendayagunaan aparatur pemerintah di daerah.
5. Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam serta menjaga keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup.
6. Percepatan pembangunan/pengembangan Kota Soreang sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Dati II Bandung.
7. Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani.
8. Peningkatan keefektifan program KB.

2. TUJUAN.

Dalam upaya melaksanakan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, maka Pola Umum Pelita V ditujukan untuk:

Pertama : Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil.

Kedua : Mempertahankan fungsi hidroologis bagi areal yang sudah maupun yang masih harus memerankan fungsi hidroologis dalam rangka terjaminnya kelangsungan pembangunan yang berkesinambungan.

Ketiga : Meningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah dalam rangka memantapkan pengendalian, pengawasan pembangunan dan pemerintah yang bersih serta pelayanan kepada masyarakat.

Keempat : Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

3. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN.

Pembangunan di Kabupaten Dati II Bandung tetap akan diprioritaskan pada bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian dan industri melalui kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi di daerah.

Kebijaksanaan di atas selanjutnya dijabarkan dalam kebijaksanaan spasial/tata ruang dan kebijaksanaan bidang/sektor.

a. Kebijaksanaan Tata Ruang.

Kebijaksanaan Tata Ruang merupakan usaha optimalisasi potensi di setiap wilayah pembangunan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan daerah dan nasional.

Setiap wilayah pembangunan mempunyai potensi dan permasalahan yang khas. Karena itu, pengarahan pengembangannyapun khas. Atas kebijaksanaan perwilayahan/spasial ini akan menjadi dasar penyusunan Repelita V Daerah Kabupaten Dati II Bandung. Kebijaksanaan bidang/sektor tidak terlepas bahkan berkaitan dengan dan menunjang kebijaksanaan Tata Ruang di Kabupaten Dati II Bandung secara keseluruhan.

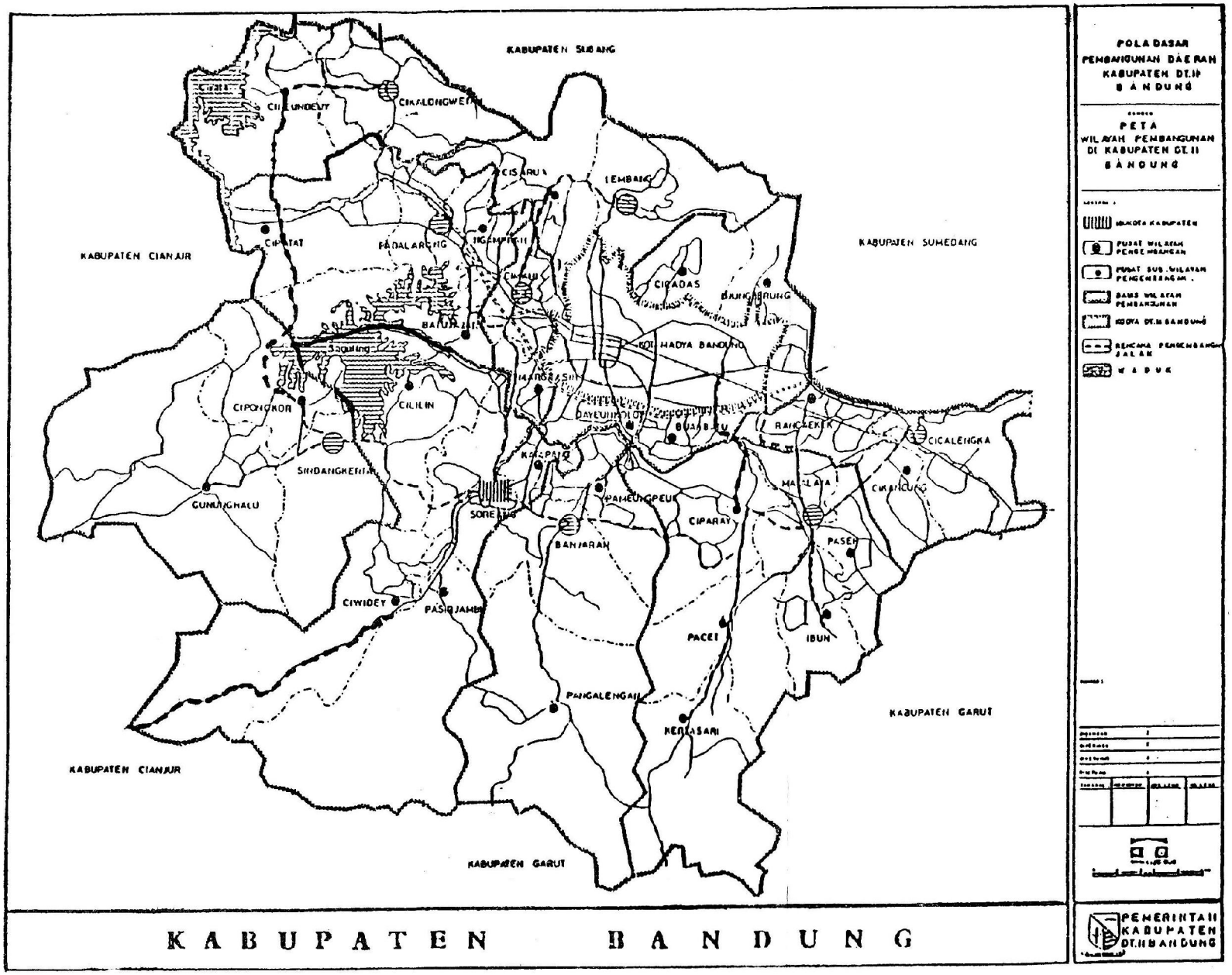
Adapun kebijaksanaan di setiap wilayah pembangunan secara spesifik adalah sebagai berikut:

1) Wilayah Pembangunan Cikalongwetan.

a) Pembangunan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Cikalongwetan sebagai pusat pengembangan.

b) Peningkatan jaringan jalan antara Cikalongwetan – Cipeundeuy untuk menunjang perkembangan pariwisata Cirata.

c) Penataan ruang sekitar Waduk Cirata sebagai obyek rekreasi.


KABUPATEN SUMEDANG
KABUPATEN CIANJUR
KABUPATEN SUMEDANG
KABUPATEN CIANJUR
KABUPATEN GARUT
KABUPATEN GARUT
CIMAHI
CILEUNYI
CIKALONGWETAN
CISARUA
LEMBANG
CIPATAT
PADALARANG
NGAMPRAH
CIMENYAN
CIPADAS
BANJARAN
BANDUNG
KOTAMADYA BANDUNG
CIPONGKOR
CILILIN
SINDANGKERTA
GUNUNGHALU
SOREANG
KUTAWARINGIN
BOJONGSOANG
RANCAEKEK
CICALENGKA
MAJALAYA
CIKANCUNG
CIPARAY
PASEH
CIWIDEY
PASIRJAMBU
PACET
IBUN
PANGALENGAN
KERTASARI
POLA DASAR
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DT.II
BANDUNG
PETA
WILAYAH PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN DT.II
BANDUNG
PEMERINTAH
KABUPATEN
DT.II BANDUNG
KABUPATEN BANDUNG

d) Fungsionalisasi kawasan konservasi di bagian timur Kecamatan Cikalongwetan dengan jalan reboisasi.

e) Intensifikasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan pendapatan petani.

2) Wilayah Pembangunan Padalarang.

a) Peningkatan fasilitas pelayanan dan utilitas perkotaan di pusat pengembangan.

b) Penataan Kota Padalarang diprioritaskan untuk menyiapkan Padalarang sebagai pusat pengembangan.

c) Peningkatan prasarana perhubungan, khususnya antara Cimareme – Batujajar untuk menunjang terwujudnya jalur antara Soreang – Batujajar – Padalarang.

d) Intensifikasi budidaya lahan kering.

e) Konservasi lahan di wilayah belakangnya.

f) Pengarahan dan penataan ruang kawasan permukiman serta penataan kawasan Situ Ciburuy sebagai objek rekreasi.

3) Wilayah Pembangunan Sindangkerta.

a) Pembangunan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Sindangkerta sebagai pusat pengembangan.

b) Peningkatan prasarana perhubungan antara Sindangkerta – Soreang.

c) Intensifikasi budidaya sawah dan palawija.

d) Pengembangan perkebunan teh dan kopi.

e) Pengembangan pariwisata dan pengembangan perikanan dengan sistem jala terapung di Waduk Saguling.

4) Wilayah Pembangunan Soreang.

a) Pembangunan fasilitas dan utilitas perkotaan di Soreang.

b) Penyelesaian pembangunan komplek perkantoran Kabupaten Dati II Bandung.

c) Peningkatan jaringan jalan antara Batujajar – Soreang – Banjaran.

d) Penataan ruang kota Soreang.

e) Pengembangan sarana telekomunikasi (telepon sistem otomat).

f) Fungsionalisasi angkutan Kereta Api Bandung – Ciwidey.

g) Pengembangan sarana Olah Raga dan permukiman di Soreang.

h) Pembinaan industri rumahan dan industri kecil.

i) Intensifikasi pertanian pada lahan basah/kering.

j) Konservasi dan rehabilitasi lahan gundul di Ciwidey dan Pasirjambu.

k) Pengembangan dan peningkatan fasilitas pariwisata di Kecamatan Ciwidey dan Pasirjambu.

5) Wilayah Pembangunan Banjaran.

a) Peningkatan fasilitas dan utilitas perkotaan di kota-kota kecamatan.

b) Penentuan dan pengarahan lokasi kawasan industri yang tersebar di sepanjang jalan Dayeuhkolot – Banjaran.

c) Penataan ruang kota Banjaran.

d) Peningkatan jaringan jalan antara Banjaran – Ciparay.

e) Pembinaan terhadap peternak Sapi, khususnya di Pangalengan serta cara pengolahan produksi dan pemasarannya.

f) Intensifikasi pertanian lahan kering.

g) Konservasi dan rehabilitasi lahan kritis di bagian selatan.

6) Wilayah Pembangunan Majalaya.

a) Peningkatan fasilitas dan utilitas perkotaan di Majalaya dan Ciparay.

b) Penataan ruang kota Majalaya dan Ciparay.

c) Penataan kawasan industri di Majalaya.

d) Pengembangan kawasan perumahan ke Ciparay.

e) Peningkatan/pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan Majalaya (sentra industri) dengan Gedebage (pergudangan).

f) Peningkatan jaringan jalan antara Ciparay – Majalaya – Cicalengka.

g) Pengarahan pusat pendidikan menengah/tinggi, fasilitas sosial dan perumahan di Baleendah.

h) Intensifikasi lahan pertanian.

i) Konservasi dan rehabilitasi lahan kritis di bagian selatan.

7) Wilayah Pembangunan Cicalengka.

a) Peningkatan fasilitas dan utilitas perkotaan.

b) Penataan ruang kota Cicalengka dan Rancaekek.

c) Penentuan lokasi untuk pengembangan industri di Cicalengka, Rancaekek dan Cikancung.

d) Pengarahan Rancaekek sebagai kawasan permukiman guna menunjang pusat pendidikan Jatinangor dan kawasan industri.

e) Intensifikasi pertanian.

f) Konservasi dan rehabilitasi lahan kritis di SUBDAS Citarik DS.

8) Wilayah Pembangunan Lembang.

a) Peningkatan fasilitas pelayanan dan pembangunan utilitas perkotaan.

b) Penataan ruang kota Lembang.

c) Peningkatan/pembangunan sarana akomodasi pariwisata di Maribaya, Gunung Tangkuban Perahu dan Curug Cimahi.

d) Intensifikasi budidaya lahan kering (palawija).

e) Konservasi dan reboisasi di wilayah konservasi air.

f) Pembinaan terhadap petani dan peternak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

9) Wilayah Pembangunan Cimahi.

a) Pembangunan utilitas perkotaan.

b) Pencadangan lahan sepanjang jalur jalan (koridor)

Bandung – Cimahi untuk kegiatan perkantoran dan jasa perdagangan.

c) Pengembangan terminal lokal dan lintasan/rute kendaraan umum yang melayani Kota Cimahi dan daerah sekitarnya.

d) Pengendalian dan penertiban pembangunan di kawasan Bandung Utara.

e) Intensifikasi budidaya lahan kering di bagian utara.

f) Konservasi dan reboisasi di bagian utara.

g) Rehabilitasi dan peningkatan pusat kegiatan perdagangan di sekitar Jalan Gandawijaya.

10) Wilayah Pembangunan Penyangga.

a) Penataan ruang wilayah penyangga secara terpadu dengan wilayah tetangga. (Kecamatan Dayeuhkolot – Bojongsoang – Cileunyi – Cilengkrang dan Cimenyan).

b) Konservasi dan rehabilitasi lahan di bagian utara.

c) Intensifikasi budidaya lahan kering di bagian utara.

d). Lahan untuk pengembangan industri di Kecamatan Dayeuhkolot.

b. Kebijaksanaan Bidang/Sektor.

1) Bidang Ekonomi.

a) Pertanian.

1. Peningkatan produksi dan penganekaragaman hasil Pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan industri.

2. Peningkatan dan pelestarian swasembada pangan melalui program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi serta dengan lebih mengkoordinasikan kegiatan antar instansi yang terkait.

3. Pengendalian keseimbangan penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian dan non pertanian.

4. Penyusunan perwilayahan pengembangan pertanian dan lahan kehutanan.

5. Pemanfaatan potensi sumber air secara optimal untuk keperluan pertanian. air bersih dan sumber energi.
6. Pemeliharaan dan rehabilitasi pengairan pedesaan.
7. Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
8. Peningkatan kegiatan P3A Mitra Cai dan kelompok tani.

b) Industri.
1. Pembangunan sektor industri di arahkan kepada industri-industri yang dapat menyerap tenaga kerja dan memanfaatkan bahan baku yang ada di daerah sendiri.
2. Pengembangan industri kecil melalui penerapan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi yang memanfaatkan sumber dan potensi yang dimiliki dengan memantapkan hubungan antara pengusaha industri kecil, menengah dan besar melalui sistem bapak angkat.
3. Pengarahan lokasi dan penataan kawasan industri dengan mempertimbangkan keseimbangan pengembangan pertanian dan pengembangan perkotaan.

c) Pertambangan dan Bahan Galian.
1. Peningkatan usaha pertambangan dan bahan galian golongan C dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C serta menata kembali kawasan penambangan bahan galian C yang sudah tidak terpakai.

d) Energi.
1. Pemanfaatan sumber-sumber energi secara optimal.
2. Pemenuhan energi/tenaga listrik untuk masyarakat dan industri terutama di pedesaan.

e) Perhubungan dan Pariwisata.
1. Pembangunan Kantor Pos dan sarana telekomunikasi

terutama di kecamatan baru.

2. Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan terutama prasarana dan sarana yang sangat menunjang perkembangan ekonomi dan membuka daerah-daerah terpencil serta yang menghubungkan obyek-obyek wisata.
3. Pengembangan industri pariwisata melalui paket wisata dan pengenalan obyek wisata dalam usaha menarik wisatawan asing dan domestik.
4. Pemeliharaan dan pembinaan mutu kebudayaan yang menjadi sumber obyek wisata terutama kebudayaan asli daerah.
5. Menarik potensi swasta dalam pengembangan usaha pariwisata.

f) Perdagangan.

1. Peningkatan efisiensi dan kelancaran arus pemasaran yang dapat menciptakan keadaan dan perkembangan harga yang layak dan bersaing sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada golongan ekonomi lemah dalam segala kegiatan usahanya melalui kursus-kursus dan latihan keterampilan serta fasilitas permodalan untuk meningkatkan usahanya.
3. Meningkatkan fungsi dan peranan BKPD serta LPK (Lembaga Perkreditan Kecamatan).

h) Koperasi.

1. Pengembangan Koperasi terutama KUD sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berwatak sosial, melalui peningkatan keterampilan menejer pengurusnya, dalam usaha menumbuhkan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan menuju KUD mandiri.
2. Pengembangan peran Koperasi ke semua sektor ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, angkutan dan lain-lain.

3. Pemantapan dan peningkatan kesadaran berkoperasi kepada aparat pembina dan seluruh lapisan masyarakat.

i) Dunia Usaha dan Golongan Ekonomi Lemah.

1. Pengembangan kerjasama yang serasi antara golongan usaha besar, menengah, kecil dan Koperasi dengan semangat saling menguntungkan.
2. Perluasan kesempatan memperoleh kredit bagi pengusaha golongan ekonomi lemah sampai ke pedesaan.
3. Pengembangan sikap kewiraswastaan, kemampuan dan keahlian golongan ekonomi baik melalui latihan maupun pemberian kesempatan berusaha.
4. Pemantapan fungsi atau peran KADIN dalam membina kegiatan dunia usaha terutama bagi pengusaha ekonomi lemah.

j) Tenaga kerja.

1. Perluasan kesempatan kerja.
2. Pengalihan beberapa jenis pekerjaan tertentu ke jenis pekerjaan yang lebih layak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Peningkatan keterampilan tenaga kerja yang siap pakai dalam pembangunan.
4. Peningkatan fungsi balai latihan kerja dan keterampilan.
5. Peningkatan dan pemantapan latihan keterampilan dan kewiraswastaan sesuai dengan kemampuan yang diintegrasikan dengan PKK/LKMD sehingga melembaga secara lestari.

k) Transmigrasi.

Penggalakan dan pengembangan program transmigrasi khususnya transmigrasi swakarsa, sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup, mengurangi kepadatan penduduk serta memperluas kesempatan kerja dan berusaha.

l) Pembangunan Daerah, Desa dan Kota.

1. Pengembangan kota-kota kecamatan secara lebih terarah dan terencana.
2. Penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan dengan mengaitkan fungsi perencanaan dengan fungsi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
3. Melahirkan desa mandiri sebagai usaha peningkatan desa swasembada sebagai persiapan menuju desa Pancasila.
4. Penataan wilayah administrasi akibat PP. 2/86 dan PP. 16 Tahun 1987.

m) Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

1. Pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya.
2. Penanggulangan lahan kritis dengan mengikutsertakan masyarakat dalam memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3. Pencegahan kerusakan alam dan lingkungan hidup.

2. Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Sosial Budaya.

a) Agama.

1. Peningkatan pembinaan mental spiritual.
2. Peningkatan pembinaan kehidupan/kerukunan beragama, di antara sesama umat beragama, antar umat beragama, antara umat beragama dengan pemerintah dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan.
3. Peningkatan prasarana dan sarana serta pembinaan pendidikan keagamaan, baik melalui sekolah-sekolah umum maupun pesantren-pesantren.

b). Pendidikan.

1. Perluasan pendidikan luar sekolah yang prospektif sesuai dengan pasaran kerja.
2. Pemantapan koordinasi antar instansi penyelenggara-

an pendidikan luar sekolah.

3. Peningkatan mutu pendidikan dan daya tampung SMTP, SMTA dan Perguruan Tinggi.
4. Pengembangan dan pembinaan Sekolah Luar Biasa.

c) Kebudayaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

1. Pengembangan dan peningkatan pembinaan kebudayaan, kesenian dan bahasa daerah dalam rangka melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.
2. Pelestarian benda-benda bersejarah.
3. Pembinaan terhadap para penganut kepercayaan kepada Tuhan YME agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru.

d) Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian.

1. Perluasan kesempatan bagi kegiatan penelitian dan dalam bidang pengetahuan sosial, ekonomi dan teknologi terutama teknologi tepat guna.
2. Pemanfaatan hasil penelitian lembaga-lembaga penelitian ilmiah dalam rangka meningkatkan pembangunan.
3. Peningkatan kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dalam menunjang kegiatan pembangunan.

e) Kesehatan.

1. Peningkatan prasarana dan sarana serta pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan kesehatan.

f) Kependudukan dan Keluarga Berencana.

1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB), khususnya dengan mengusahakan tambahan peserta KB baru, pengembangan KB mandiri dan pengembangan kelembagaan

seperti Pusat Informasi Pesantren (PIP) dan KB-PKK.

2. Pengendalian persebaran penduduk yang lebih merata melalui penyediaan lapangan kerja di pedesaan.
3. Peningkatan kualitas kehidupan dan pembentukan tenaga kerja yang terampil.
4. Pendekatan tertib administrasi kependudukan sesuai dengan Kepres No. 52 Tahun 1977.

g) Perumahan dan Permukiman.

1. Perbaikan lingkungan perumahan/permukiman serta pengadaan air bersih dan sarana penunjang lainnya yang memadai terutama bagi masyarakat pedesaan.
2. Penyediaan lahan pemukiman sesuai dengan tata ruang.

h) Kesejahteraan Sosial.

1. Peningkatan peran dan fungsi organisasi sosial serta pekerja sosial masyarakat dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Peningkatan dan perluasan jangkauan serta penyantunan penyandang masalah sosial untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan kemampuan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan peranserta dalam pembangunan.
3. Rehabilitasi sosial dan penanggulangan korban bencana alam.

i) Generasi Muda dan Olah Raga.

1. Pembinaan organisasi pemuda sebagai wadah dan wahana kaderisasi serta regenerasi.
2. Pembentukan watak generasi muda sebagai generasi pejuang dan penerus bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pengembangan bibit olah ragawan baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, terutama untuk mencapai prestasi.

4. Pembinaan olah raga dengan peningkatan peranserta masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana olah raga.

j) Peranan Wanita dalam Pembangunan.

1. Peningkatan peranserta kaum wanita di dalam kegiatan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan kodratnya.
2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kaum wanita disertai peningkatan kesempatan kerja.
3. Peningkatan peranan wanita dalam pembinaan kesejahteraan keluarga.

3. Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Media Massa.

a) Politik.

1. Peningkatan kesadaran bernegara dan berpolitik dengan lebih memantapkan kehidupan demokrasi Pancasila dan disiplin Nasional, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk pelaksanaan pembangunan.
2. Pemantapan penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam segala segi kehidupan dan penghidupan dengan menyebarluaskan P 4 di kalangan masyarakat.

b) Aparatur Pemerintah.

1. Peningkatan mutu aparatur pemerintah secara menyeluruh melalui pendidikan dan kursus-kursus untuk melahirkan aparatur sebagai pelopor disiplin Nasional dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.
2. Peningkatan pendayagunaan aparatur pemerintah di daerah disertai usaha peningkatan karier dan kesejahteraannya.
3. Penataan kembali wilayah-wilayah administrasi pemerintahan.

4. Penyempurnaan serta pemanfaatan struktur dan tatalaksana pemerintah sampai ke desa-desa.
5. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan.
6. Realisasi pemindahan Ibukota.
7. Pemekaran wilayah kecamatan dan desa.

c) Hukum.

1. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi masyarakat serta aparatur pemerintah melalui penyuluhan dan penegakan hukum.
2. Peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga bantuan hukum.
3. Peningkatan kegiatan penyempurnaan dan pembaharuan hukum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

d) Penerangan, Pers dan Komunikasi.

1. Peningkatan peranan media massa, Sturada dan radio swasta dalam menunjang dan memasyarakatkan program-program pembangunan melalui siaran pedesaan.
2. Perluasan penyampaian informasi pembangunan agar dengan cepat dapat menjangkau seluruh masyarakat.
3. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi timbal balik antara sesama masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah.
4. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
   a. Pemantapan kemanunggalan ABRI dengan rakyat melalui ABRI Masuk Desa (AMD) serta Operasi Bhakti ABRI.
   b. Penanaman kesadaran bela Negara.
   c. Pemantapan pelaksanaan sistem Hankamrata dalam rangka mewujudkan kekuatan keamanan, ketahanan serta stabilitas daerah.

d. Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya subversi ideologi baik kanan/kiri maupun bahaya latent komunis.

4. **PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.**

Sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, maka Pelita V Daerah Kabupaten Dati II Bandung diprioritaskan pada pembangunan bidang ekonomi, dengan titik berat pada sektor pertanian dan industri melalui peningkatan mutu sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, pengembangan kegiatan ekonomi dan pendayagunaan aparatur pemerintah dengan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sejalan dengan prioritas pada pembangunan bidang ekonomi, maka pembangunan bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta agama makin ditingkatkan sesuai dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi.

5. **SASARAN PEMBANGUNAN.**

Pada hakekatnya pembangunan merupakan upaya pemerintah dan masyarakat dalam rangka menyejahterakan rakyat. Untuk lebih jelasnya sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan bidang/sektornya adalah sebagai berikut:

a. Bidang Ekonomi.

1) Pertanian.

a. Meningkatnya produksi pertanian terutama pangan dan komoditi ekspor yang dapat menaikkan tarap hidup para petani dan diharapkan sekaligus bisa menunjang sektor-sektor lain di luar pertanian.

b. Meningkatnya nilai gizi konsumsi masyarakat sejalan dengan meningkatnya produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

c. Tercapainya rehabilitasi tanah kritis dengan memperhatikan tingkat kesuburan tanah, sumber air dan sumber alam lainnya.

d. Terpeliharanya sarana pengairan untuk pencapaian

produksi yang tinggi.

e. Terbangunnya saluran tersier yang lebih merata disertai pengaturan dan pengelolaannya yang baik antara para petani pemakai air/P3A Mitra Cai dengan bimbingan teknis Dinas yang bersangkutan.

2) Industri.

a. Berkembangnya sektor industri yang diarahkan pada industri yang bisa membantu berkembangnya industri kecil dan dapat menyerap tenaga kerja yang besar.

b. Terkendalinya perkembangan industri sehingga tidak menimbulkan pengaruh negatip terhadap lingkungan.

c. Terciptanya struktur ekonomi di mana perkembangan sektor industri didukung oleh pertanian yang tangguh.

3) Pertambangan dan Bahan Galian.

a. Tersedianya peta lokasi bahan mineral strategis dan vital.

b. Bermunculannya usaha penambangan dan penggalian milik rakyat yang menggunakan teknologi tepat guna.

c. Terpeliharanya kelestarian dan keseimbangan lingkungan di lokasi dan sekitar penambangan.

4) Energi.

a. Berkembangnya penggunaan energi non migas untuk keperluan sehari-hari sesuai dengan potensi pedesaan.

b. Tercapainya program listrik masuk desa sehingga dapat lebih mendorong pada kegiatan masyarakat yang produktif.

5) Perhubungan.

a. Bertambahnya prasarana dan sarana perhubungan sehingga memperlancar arus lalu-lintas dan membuka daerah-daerah terpencil serta obyek-obyek wisata.

b. Tersedianya fasilitas-fasilitas umum seperti terminal, lapangan parkir, sarana telekomunikasi, kantor pos pem-

bantu, sehingga pelayanan kepada masyarakat meningkat.

6) Pariwisata.

a. Berkembangnya industri pariwisata melalui paket pariwisata dalam usaha menarik wisatawan asing ataupun domestik.

b. Meningkatnya perkembangan obyek wisata serta kebudayaan sehingga penerimaan daerah meningkat sekaligus memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

c. Terpelihara dan terbinanya mutu kebudayaan yang menjadi sumber obyek wisata terutama kebudayaan asli daerah.

7) Perdagangan.

a. Meningkatnya keterampilan manajemen serta kewiraswastaan para pengusaha golongan ekonomi lemah.

b. Terorganisasinya mekanisme pasar khususnya Badan Pemasaran.

c. Meningkatnya bantuan modal dalam bentuk kredit melalui BKPD dan lembaga perkreditan kecamatan bagi golongan ekonomi lemah.

d. Meningkatnya bantuan modal bagi perusahaan-perusahaan daerah untuk membantu kelancaran usahanya.

8) Koperasi.

a. Meningkatnya bantuan modal dan kemudahan bagi kelancaran usaha-usaha Koperasi, sehingga mendorong meningkatnya kemampuan dan kegiatan usaha tersebut.

b. Meningkatnya fungsi dan peranan KUD sebagai lembaga perekonomian rakyat.

c. Meningkatnya managemen para pengusaha dan pelaksanaan Koperasi dan kader pembangunan di tingkat kecamatan dan desa.

9) Dunia Usaha.

a. Terjalinnya kerja sama antara pengusaha besar, mene-

ngah, kecil serta Koperasi yang mantap dan saling menguntungkan.

b. Berperannya Kadin dan Gapensi dalam rangka pembinaan dunia usaha.

c. Terbinanya golongan ekonomi lemah dalam rangka peningkatan kewiraswastaan.

10) Tenaga Kerja.

a. Meningkatnya keahlian dan keterampilan masyarakat.

b. Tersedianya tempat-tempat latihan keterampilan.

c. Terhindarnya pengeksploitasian buruh secara berlebihan dengan meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja buruh.

d. Terbentuknya sistem upah/penggajian minimum untuk mencapai kesejahteraan buruh/karyawan beserta keluarganya.

e. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dan pemenuhan kesejahteraan buruh pada perusahaan swasta.

f. Terserapnya tenaga kerja/angkatan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.

g. Tersedianya bursa informasi kerja sehingga memudahkan pencari kerja.

11) Transmigrasi.

a. Terlaksananya program penyebaran penduduk melalui transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa dari daerah kritis dan padat penduduk, daerah-daerah yang terkena proyek pembangunan, bencana alam, ke luar pulau Jawa secara berencana.

b. Tersedianya fasilitas latihan keterampilan untuk mendidik calon transmigran.

12) Pembangunan Daerah Kota dan Desa.

a. Terbangunnya prasarana dan sarana fisik Pusat Pemerintahan di Soreang.

b. Terwujudnya rencana dan prasarana kota bagi kota-kota

Padalarang, Banjaran, Majalaya, Ciparay, Rancaekek, Cicalengka, Lembang, Pangalengan, Cisarua dan wilayah penyangga.

c. Tercapainya peningkatan status desa-desa swakarsa menjadi desa swasembada.

d. Meningkatnya prasarana fisik pemerintahan yang belum memadai.

13) Pengolahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

a. Berkurangnya lahan kritis di Sub DAS Citarik DS, Sub DAS Cikapundung DS serta Sub DAS Cisokan DS yang meliputi 29 kecamatan.

b. Terbangunnya prasarana pencegahan erosi dan penanggulangan banjir.

c. Berkurangnya lahan kritis di atas lahan milik rakyat.

d. Terciptanya tata ruang dan tata guna tanah yang sesuai dengan kondisi fisik.

b. Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya.

1) Agama.

a. Bertambahnya sarana dan prasarana fisik peribadatan serta berkembangnya pendidikan keagamaan dalam usaha meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan YME.

b. Terwujudnya kerukunan hidup beragama diantara sesama umat beragama antar umat beragama serta antara umat beragama dengan pemerintah dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.

c. Meningkatnya pelayanan dan penyuluhan kepada calon jemaah haji untuk kelancaran perjalanan dan kesempurnaan pelaksanaan ibadah haji.

d. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat dan berwakaf serta usaha-usaha lain dalam kehidupan sosial keagamaan yang disertai dengan makin baiknya pemanfaatan dan pengelolaannya.

2) Pendidikan.

a. Bertambahnya fasilitas pendidikan.

b. Makin memadainya fasilitas kerja dan terciptanya kondisi kehidupan yang layak bagi seluruh tenaga pendidikan, guna lancarnya proses belajar-mengajar.

c. Tersedianya fasilitas pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, penyandang cacat atau bertempat tinggal terpencil.

d. Makin efektifnya pelaksanaan wajib belajar bagi usia 7 sampai 12 tahun dan meningkatnya kesempatan belajar di SMTP dan SMTA.

e. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang buta huruf, putus sekolah, dan anggota masyarakat lainnya.

3) Kebudayaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

a. Berkembangnya kesenian dan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kesenian Nasional.

b. Terpeliharanya bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan budaya Nasional.

c. Terpeliharanya benda-benda kepurbakalaan yang mengandung nilai sejarah.

d. Terbinanya para penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak mengarah kepada pembentukan agama baru.

4) Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian.

a. Terjalinnya kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian yang ada.

b. Dimanfaatkannya hasil-hasil penelitian untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Dati II Bandung, khususnya teknologi tepat guna.

5) Kesehatan.

a. Meratanya pelayanan kesehatan di seluruh wilayah.

b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

c. Bertambahnya jumlah tenaga serta prasarana dan sarana kesehatan.

6) Kependudukan dan Keluarga Berencana.

a. Terkendalinya pertambahan penduduk.

b. Terciptanya pola persebaran penduduk yang seimbang antara perkotaan dan pedesaan.

c. Meningkatnya pelayanan dan akseptor KB dalam rangka mendukung NKKBS.

d. Makin baiknya administrasi kependudukan di semua tingkatan pemerintahan.

7) Perumahan dan Permukiman.

a. Tersedianya perumahan murah yang layak.

b. Makin baiknya kondisi lingkungan perumahan rakyat.

c. Tersedianya air bersih bagi masyarakat.

8) Kesejahteraan Sosial.

a. Meningkatnya peranserta organisasi dan pekerja sosial masyarakat.

b. Tumbuhnya kepercayaan diri dan kesempatan para penyandang masalah sosial.

c. Masalah-masalah sosial dapat terkendali.

9) Generasi Muda.

a. Tumbuhnya jiwa kewiraswastaan di kalangan pemuda.

b. Mantapnya organisasi pemuda.

c. Melembaganya mental agama dan jiwa kebangsaan di kalangan pemuda.

d. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para pemuda.

e. Tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan di kalangan pemuda.

f. Tersalurkannya aspirasi dan kreativitas para pemuda ke arah yang lebih positif.

g. Tersedianya fasilitas untuk menyalurkan kegiatan para pemuda.

10) Peranan Wanita dalam Pembangunan.

a. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kaum wanita sehingga mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya.

b. Makin berperannya PKK sebagai wahana partisipasi kaum wanita dalam pembangunan yang diikuti dengan pembinaan organisasi dan modifikasi program kerja agar semakin berdayaguna dan berhasilguna.

c. Meningkatnya peranan wanita dalam pembinaan kesejahteraan keluarga terutama bagi pembinaan kesejahteraan dan perkembangan generasi muda sebagai generasi penerus.

c) Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Mass Media.

1) Politik.

a. Makin mantapnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam menunjang program pembangunan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

b. Meningkatnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

c. Meningkatnya peranan dan fungsi Partai Politik dan Golongan Karya dalam menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berorientasi kepada program pembangunan di daerah.

2) Aparatur Pemerintah.

a. Meningkatnya pengabdian dan keahlian aparatur daerah dengan semakin terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas

umum pemerintahan serta kemasyarakatan maupun untuk menggerakkan pelaksanaan pembangunan.

b. Meningkatnya jumlah dan keahlian aparatur pemerintah disertai meningkatnya kesejahteraan.

c. Terselenggaranya pemekaran wilayah administrasi sesuai dengan laju perkembangannya.

d. Terwujudnya Pusat Pemerintahan Kabupaten Dati II Bandung di Soreang.

3) Hukum.

a. Semakin mantapnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.

b. Terselenggaranya perlindungan hukum bagi masyarakat.

c. Meningkatnya fungsi aparatur penegak hukum di daerah.

d. Semakin tertibnya tata administrasi hukum.

4) Penerangan dan Komunikasi.

a. Meningkatnya kegiatan penerangan dan peranan media massa untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan nasional dan menggairahkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan.

b. Berkembangnya jumlah kelompencapir sampai seluruh pelosok termasuk berkembangnya sturada Kabupaten Dati II Bandung.

c. Berkembangnya pers daerah dalam rangka menunjang suksesnya pembangunan dan merangsang tumbuhnya peranserta masyarakat.

d. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bela negara dan sishankamrata yang diwujudkan dalam bentuk kemantapan kesadaran dan kemampuan perlindungan masyarakat serta Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

2) Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya ekstrem kiri dan ekstrem kanan.

3) Semakin meningkatnya kemanunggalan ABRI dengan rakyat.

6. STRATEGI PEMBIAYAAN.

a. Strategi Pembiayaan Pembangunan.

1) Sesuai dengan penggarisan nasional bahwa pembangunan daerah lebih di arahkan pada peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat maka strategi pembiayaan di Kabupaten Dati II Bandung di arahkan kepada pendayagunaan potensi dana yang berasal dari masyarakat.

Dengan demikian akan diusahakan agar kontribusi pembiayaan sektor masyarakat atau swasta makin meningkat dan lebih besar dari pembiayaan pembangunan pemerintah.

2) Mengupayakan terciptanya iklim usaha yang baik sesuai dengan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi serta kebijaksanaan dan peraturan lainnya baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah.

3) Mengupayakan peningkatan alokasi anggaran sektoral. APBN, APBD TK. I, pinjaman dalam negeri dan bantuan luar negeri yang berorientasi kepada program pembangunan di daerah di samping itu bantuan luar negeri di arahkan kepada program-program yang bersifat mandiri dan berkelanjutan di dalam kegiatan dan pembiayaan dalam batas kemampuan.

4) Pendapatan Asli Daerah di arahkan kepada peningkatan pendayagunaan sumber daerah serta perluasan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dalam batas-batas menghindarkan terjadinya ekonomi biaya tinggi serta beban masyarakat yang berlebihan.

b. Prinsip Penyusunan Anggaran.

Anggaran disusun sejalan dan bersifat mengisi serta melengkapi anggaran pembangunan nasional dan regional Jawa Barat dengan berpegang kepada prinsip:

1) Berorientasi pada program.
2) Berkesinambungan dan konsisten.
3) Tingkat kepentingan dan skala prioritas.
4) Berhasilguna dan berdayaguna.
5) Anggaran berimbang dan dinamis.
6) Prinsip mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

BAB. IV

PENUTUP

1. PELAKSANAAN.

a. Pola Dasar Pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bandung, yang kemudian disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

b. Pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, dalam bentuk Repelita Daerah dengan memperhatikan saran-saran pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II Bandung dalam rangka penetapan Peraturan Daerah tersebut dalam butir a.

c. Tiap lima tahun sekali Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Dati II Bandung ditinjau kembali, untuk disesuaikan dengan kebijaksanaan Nasional dan kebijaksanaan Regional Jawa Barat serta pengembangan Daerah Kabupaten Dati II Bandung.

d. Perwujudan Pola Dasar Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kabupaten Dati II Bandung dilaksanakan secara bertahap. Tahap-tahap pelaksanaan ini tercermin dalam rangkaian Pelita-pelita dan program tahunan yang keseluruhan rangkaian tersebut merupakan satu kesatuan yang serasi dan tidak terpisahkan.

2. PERSYARATAN.

a. Pelita kelima Kabupaten Dati II Bandung merupakan pelaksanaan tahap akhir dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Jangka Panjang 25 tahun pertama, harus dapat memantapkan landasan yang kokoh, kuat guna memasuki tahapan Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua.

b. Berhasilnya pembangunan sebagai pengamalan Pancasila tergantung kepada partisipasi masyarakat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara di daerah Kabupaten Dati II Bandung serta seluruh masyarakat.

c. Sehubungan dengan itu semua kekuatan sosial, politik dan organisasi kemasyarakatan harus berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tahapan dan sasaran yang hendak

dicapai dalam Pola Dasar dan Repelita V Daerah Kabupaten Dati II Bandung.

d. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara makin merata dan adil oleh seluruh masyarakat Kabupaten Dati II Bandung sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin.

e. Kesejahteraan yang berkeadilan sosial sekaligus harus dapat meningkatkan ketahanan nasional dan pada gilirannya akan meratakan jalan bagi generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat maju, sejahtera, adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila.

Bandung, 21 Oktober 1988.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,	
Cap/tertanda	Cap/tertanda
H. SUHANDA.	**H.D. CHERMAN. E**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003